

LAKIP



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
TAHUN 2022**

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Peran pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan merupakan kebutuhan masyarakat yang terkait dalam pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pelayanan sosial secara optimal, juga perlu dilaksanakan guna mengeliminasi berbagai persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan.

Berbagai masalah sosial kemasyarakatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dipandang sebagai bentuk interaksi dan dinamisasi sosial kemasyarakatan dan sangat diperlukan penanganan secara komprehensif, melalui sinergi berbagai program pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat.

Permasalahan sosial kemasyarakatan sangat membutuhkan koordinasi dan fasilitasi dalam penanganannya, antara lain dibidang mental spritual, Kesejahteraan Rakyat pelayanan dasar dan Kesejahteraan Rakyat non pelayanan dasar, yang tentunya akan melibatkan stakeholders yang relatif besar, mengingat besarnya lingkup tugas bidang sosial kemasyarakatan yang terjadi selama ini.

Disamping itu, sebagai daerah yang memiliki kekuatan adat dan budaya yang dilatarbelakangi oleh filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, maka pembangunan adat, budaya serta agama sangat membutuhkan penanganan yang sinergis dengan berbagai unsur.

Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat sebagai unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas. Aturan yang mendasari pembentukannya adalah Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020

tentang uraian tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Bina Mental Spiritual

Program kegiatan yang dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat selama tahun 2021 di dasarkan atas tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2022, Penetapan Kinerja Tahun 2022, secara konsisten terus menerus dan berkesinambungan.

Penyusunan LAKIP ini semata-mata ditujukan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai komitmen dan tekad yang kuat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang berorientasi pada hasil baik berupa output maupun outcomes. Disamping itu penyusunan LAKIP Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 juga merupakan perwujudan prinsip transparan dan akuntabilitas yang merupakan aspek dan pilar penting dalam mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dibuat sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggung jawaban kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat. Laporan ini juga merupakan wujud dari transparansi Biro Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan pembangunan bidang

keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar .

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- a) Sebagai sarana untuk menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kinerja kepada stakeholder.
- b) Sebagai sarana untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

1.3 Gambaran Umum Biro Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan unit SKPD yang langsung berada di bawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1.3.1 Tugas Pokok :

Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang bina mental spritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar.

1.3.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas dimaksud, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum bina mental spritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan Non Pelayanan Dasar;

- b) Penyelenggaraan pengoordinasi dan fasilitasi bina mental spritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan Non Pelayanan Dasar;
- c) Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi bina mental spritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan Non Pelayanan Dasar;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pergub No. 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Struktur Organisasi, Biro Kesejahteraan Rakyat dibentuk dengan struktur :

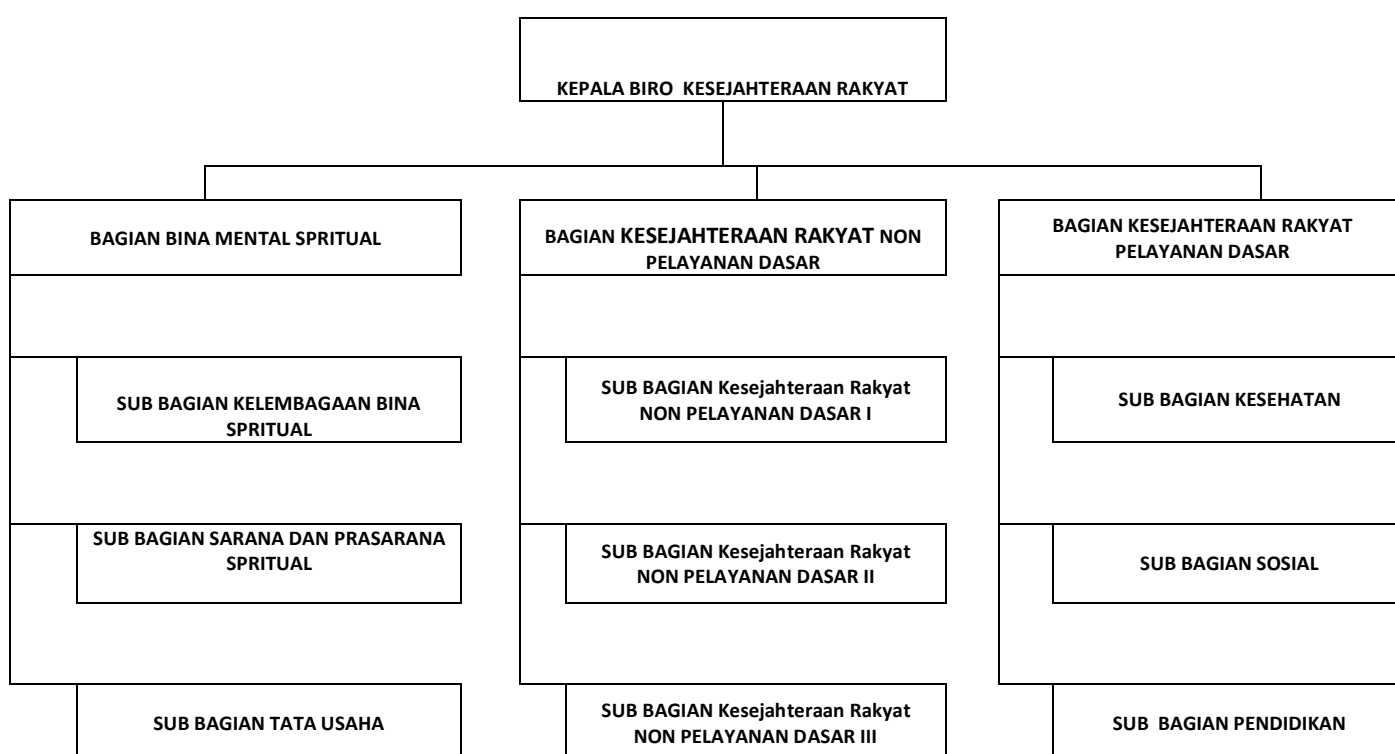
- 1. Kepala Biro,
- 2. Bagian Bina Mental Spritual terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan Bina Spritual
 - b) Sub Bagian Fasilitasi Sarana prasarana Spritual
 - c) Sub Bagian Tata Usaha
- 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III
- 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kesehatan
 - b) Sub Bagian Sosial
 - c) Sub Bagian Pendidikan

1.3.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Biro hingga Kepala Sub Bagian pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang

menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan. Struktur Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat

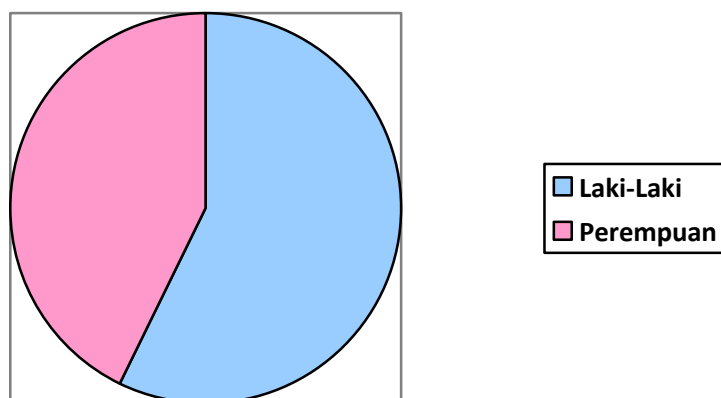


1.3.4 Sumber Daya Biro Kesejahteraan Rakyat

1.3.4.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat berjumlah 35 (Tiga Puluh Lima) orang. Komposisi pegawai tersebut terdiri dari 35 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan di uraikan berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 20 orang (57,14%) laki-laki dan 15 orang (42,46%) perempuan. Dari data tersebut dapat dikatakan antara jumlah pegawai laki-laki lebih besar dari jumlah perempuan, hal ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar



Sumber : Subag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar
Komposisi Pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar Tahun 2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SLTP	-	0%
2	SLTA	8	22,86%
3	DIPLOMA III/D-3	2	5,71%
4	STRATA 1	17	48,57%
5	STRATA 2	7	20%
6	STRATA 3	1	2,86%
	JUMLAH	35	100%

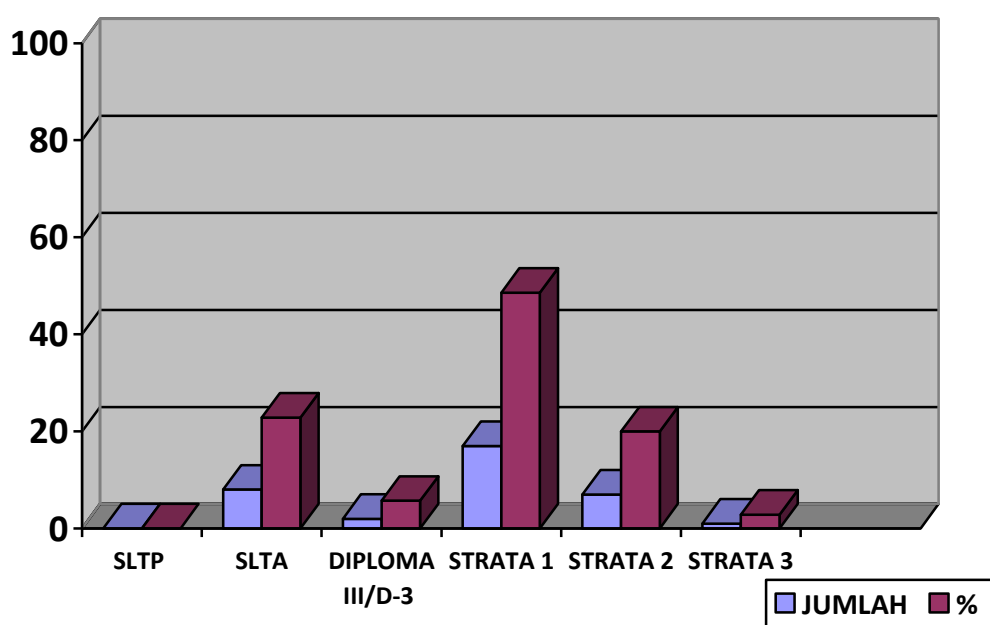
Sumber : Subag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Biro Kesejahteraan Rakyat karena lebih dari 71,43% pegawai sudah berpendidikan sarjana, sedangkan sebanyak 20,57% adalah tamatan D3 dan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai dikelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat

teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di bawah ini :

Gambar 1.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar



Sumber : Subag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel. 1.2
Daftar Golongan Pegawai
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar Tahun 2022

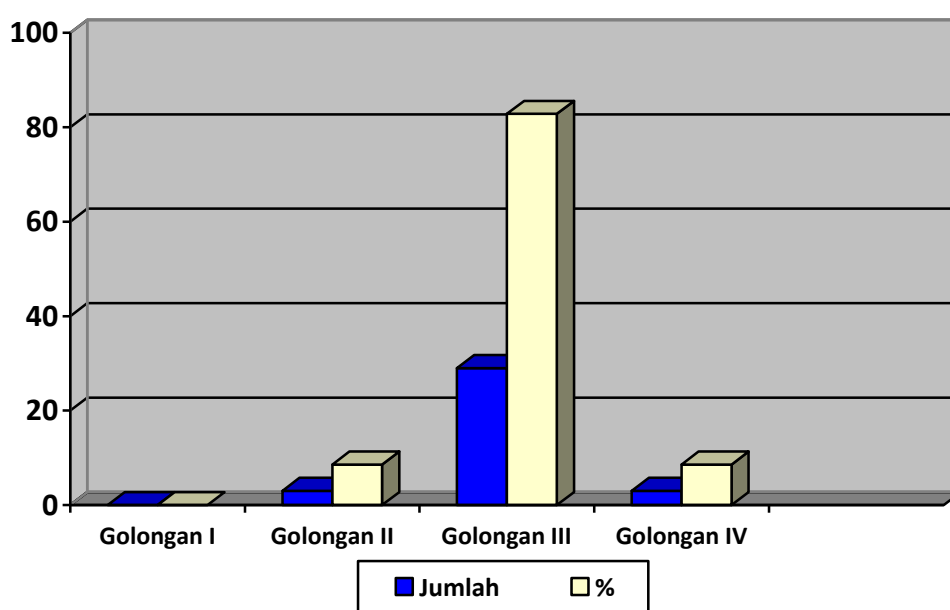
NO	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II	3	8,57%
3	Golongan III	29	82,86%
4	Golongan IV	3	8,57%
	Jumlah	35	100%

Sumber : Subag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, 82,86% dari total pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah

golongan III. Golongan II sebanyak 8,57% dari jumlah pegawai dan golongan IV sebesar 8,57% yang terdiri dari 5 pejabat struktural, diukur dari komposisi kualifikasi pendidikan pegawai, maka sebagian besar pegawai yang berpendidikan SLTA telah memasuki golongan III yang berarti telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. Berikut jumlah PNS Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per golongan

Gambar 1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar



Sumber : Subag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar

1.3.5 Anggaran

Pelaksanaan Program Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 didukung oleh Dana APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 34.020.072.223,- (Tiga Puluh Empat Milyar Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

1.3.6 Inventarisasi Aset

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang miliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Nilai aset yang dikelola Biro Kesejahteraan Rakyat per Desember 2022 sebesar **Rp. 362.416.350.760,-** (Tiga ratus enam puluh dua milyar empat ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh

ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) besaran aset yang dikelola per Desember 2022 digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Daftar Aset Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar
Per Desember 2021

NO	GOLONGAN	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		JUMLAH HARGA (Rp)	SUB TOTAL (Rp)
				PERSIL	VOL/ JUMLAH		
1	01		GOLONGAN TANAH				95.003.478.000,00
		01	Tanah	1	75.490	95.003.478.000,-	
2	02		GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN				769.787.000,00
		02	Alat-alat Besar	-	1	89.700.000,00	
		03	Alat-alat Angkutan	-	4	853.047.000,00	
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur		2	13.000.000,00	
		06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	211	2.649.922.436,33	
		07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	-	4	70.550.000,00	
4	03		GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN				266.585.840.760,00
		00	Bangunan Gedung	1	0	283.601.958.256,00	
TOTAL HARGA							362.359.105.760,00

Sumber : Kartu Inventaris Barang Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumbar

1.3.7 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat masih memakai fasilitas ruangan aula kantor Gubernur.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki 3 (Tiga) Unit Kendaraan Dinas Operasional roda 3.

1.4 Dasar Hukum Penyusunan LAKIP

Dasar Hukum penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 29 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/68/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021.
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah :

- **BABI** – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum tupoksi dan sumberdaya yang dimiliki untuk

melaksanakan kegiatan pada Tahun 2022, dasar hukum dan sistematika penulisan LAKIP.

- **BAB II** – Perencanaan dan Perjanjian Kerja yang berisi Rencana Strategis, menjelaskan muatan rencana strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2021-2026, RKT, PK Tahun 2022.
- **BAB III** – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja, pencapaian indikatornya dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan membahas Akuntabilitas Keuangan.
- **BAB IV** – Penutup, menjelaskan simpul menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

Perencanaan Kinerja

2.1 Umum

Visi : “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”.

Misi :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berasaskan falsafah ABS-SBK
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan usaha peredagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Tujuan :

1. Mewujudkan SDM berakhlak mulia sehat, unggul dan berdaya saing
2. Mewujudkan ABS-SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat

Sasaran

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan.
3. Meningkatnya Kualitas Pencari Kerja
4. Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Lebih Agamis, adat dan Berbudaya.
5. Menciptakan Desa/Nagari yang Tangguh

2.2 Strategi

Strategi yang disiapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Biro Kesra adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan kualitas akses informasi, peran lembaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan.
2. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan ajaran agama sejak dini, penguatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lembaga pendidikan, sarana ibadah dan lembaga penunjang lainnya.
3. Meningkatnya Potensi dan prestasi SDM serta potensi lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, pendidikan dan kesehatan serta lembaga kepemudaan.
4. Meningkatnya peran, kapasitas lembaga adat beserta penyelenggaranya dan keberadaan pemangku adat didalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
5. Meningkatnya koordinasi di bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan dalam rangka pengembangan kebijakan penyelenggaraan pembangunan

2.3 Arah Kebijakan

Selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Provinsi Sumatera Barat, maka arah kebijakan Biro Kesra adalah :

1. Peningkatan manajemen akses data dan informasi penyelenggaraan kegiatan.
2. Peningkatan pengelolaan sarana, prasarana penyelenggaraan kegiatan.
3. Penguatan dan pengembangan kelembagaan untuk mutu penyelenggaraan kegiatan.
4. Peningkatan manajemen lembaga pendidikan non formal keagamaan.
5. Peningkatan mutu penyuluh agama, tokoh agama serta pengelolaan sarana dan tempat ibadah.
6. peningkatan pengelolaan dan transparansi badan pengelola zakat, sedekah dan infak.
7. Peningkatan pembinaan terhadap SDM lembaga keagamaan.
8. Peningkatan pembinaan terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga sosial.
9. Pengembangan kurikulum ekstrakurikuler bidang pendidikan.
10. Peningkatan kompetensi pemangku adat.
11. Penguatan peran dan fungsi lembaga adat.

12. Penguatan fasilitasi dan koordinasi lembaga adat.
13. Peningkatan koordinasi penanganan masalah sosial.
14. Peningkatan Koordinasi masalah kesejahteraan social
15. Peningkatan koordinasi masalah kepemudaan dan lembaga kepemudaan

2.4 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi program prioritas Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan.

Program ini mempunyai beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah .
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Kesejahteraan Rakyat.

Program ini mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual.
- b. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.
- c. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.

2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penyusunan IKU berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 16 Desember 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Disamping itu, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IK/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diharuskan menyajikan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada LAKIP.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja secara baik dan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

Merujuk pada Peraturan diatas maka Indikator Kinerja Utama Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula/Penjelasan		Sumber Data
1	Meningkatnya Fasilitas Pembangunan dan Pengembangan Bina Spiritual Masyarakat	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang aktif	$\Sigma =$	Realisasi Target	Bagian Bina Mental Spiritual
		Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji	$\Sigma =$	Realisasi Target	
		Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK)	$\Sigma =$	Realisasi Target	
2	Optimalisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	$\Sigma =$	Realisasi Target	Bagian Kesra PD dan Kesra NPD
3	Optimalisasi Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang diimplementasikan	$\Sigma =$	Realisasi Target	Bagian Kesra PD dan Kesra NPD

4	Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Evaluasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah hasil evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti	$\Sigma =$	Realisasi Target	Bagian Kesra PD dan Kesra NPD
5	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja	$\Sigma =$	Realisasi Target	Bagian Bina Mental Spiritual

2.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada Tahun Anggaran 2022, Rencana Kinerja Tahunan Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah seperti tabel berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022
Biro Kesra

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Meningkatkan fasilitasi pembangunan dan pengembangan bina spiritual masyarakat	Jumlah Lembaga Bina Spritual yang aktif	7 Lembaga (LPTQ, MUI, BAZNAS, MES, MCI, BKPRMI, DMI)
		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji	sangat puas
		Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK)	peringkat 10 Nasional
2	Optimalisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	6
3	Optimalisasi Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang dimplementasikan	6
4	Meningkatnya Tindaklanjut Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah Hasil evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	6
5	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B (62)

2.7 Penetapan Kinerja Tahun 2022

Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ditetapkan dengan mengacu pada sasaran strategis RPJMD yaitu meningkatnya kompetensi aparatur daerah. Sebagai implementasi pencapaian sasaran tersebut, Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya kompetensi aparatur sesuai kompetensi jabatan yang dimiliki, meningkatnya disiplin, etos kerja dan motivasi aparatur, terpenuhinya hak dan kewajiban aparatur sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk mencapai sasaran strategis instansi menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini diukur dengan beberapa indikator kegiatan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Sasaran strategis Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2021. sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Penetapan Kinerja Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan pembangunan dan pengembangan masyarakat bina spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spritual yang aktif	7 Lembaga (LPTQ, MUI, BAZNAS, MES, MCI, BKPRMI, DMI)
		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji	sangat puas
		Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK)	peringkat 10 Nasional
2	Optimalisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	6
3	Optimalisasi Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang dimplementasikan	6
4	Meningkatnya Tindaklanjut Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah Hasil evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	6
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B (62)
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	Baik (77)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 704.025.425,-	APBD
2	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp. 33.316.046.798,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 34.020.072.223,-	

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Metodologi Pengukuran capaian Kinerja Tahun 2022

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja pada Biro Kesejahteraan Rakyat terdapat 4 (empat) indikator yaitu Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap layanan, Persentase optimalisasi

pengdokumentasian kegiatan pimpinan selama tahun 2022 dan Nilai evaluasi SAKIP, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Capaian Indikator Kinerja

NO	KLASIFIKASI	KINERJA PELAYANAN
1.	<55%	Kurang Baik
2.	>55% - 75%	Cukup
3.	>75% - 85%	Baik
4.	>85% - 100%	Sangat Baik
5.	>100%	Memuaskan

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja yang memuaskan. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 55% termasuk pada angka capaian kinerja yang kurang baik. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran terhadap indikator indikator kinerja utama per sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pimpinan tahun 2022 adalah sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1		3	4	5	6
1	Meningkatkan fasilitasi pembangunan dan pengembangan bina spiritual masyarakat	Jumlah Lembaga Bina Spritual yang aktif	7 Lembaga (LPTQ, MUI, BAZNAS, MES, MCI, BKPRMI, DMI)	9 Lembaga (LPTQ, MUI, BAZNAS, MES, MCI, BKPMRI, DMI, JPRMI, Pemuda Masjid Raya	128,58%
		Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji	sangat puas	sangat puas	100%
		Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK)	peringkat 10 Nasional	Peringkat 5 Nasional	200%
2	Optimalisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	6	6	100%
3	Optimalisasi Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang dimplementasikan	6	6	100%
4	Meningkatnya Tindaklanjut Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non	Jumlah Hasil evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	6	6	100%

	Pelayanan Dasar				
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B (62)	61.33	98.91%
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	Baik (77)	83.40	108,4%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata untuk 8 indikator kinerja yang mengukur keberhasilan 6 sasaran strategis tahun 2022 adalah 116,99%. Rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 116,99% tersebut termasuk dalam klasifikasi berhasil dengan kategori **Memuaskan**.

Dari tabel di atas juga dapat terlihat bahwa keseluruhan atau 100% indikator kinerja termasuk kategori berhasil dengan tingkat capaian >85%, Seperti pada Indeks Jumlah Lembaga Bina Spritual yang aktif, Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji, Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK), Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti, Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang dimplementasikan, Jumlah Hasil evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti, Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi.

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2022 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2022 dengan realisasinya selama tahun 2022.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja SKPD Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel 3.2, selanjutnya pada sub bab ini disajikan juga evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran.

Adapun analisa dari pencapaian ketiga sasaran strategis dari Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat seperti yang terlihat pada tabel 3.2 diatas akan diuraikan sebagai berikut:

Pembahasan Pencapaian Kinerja Per Sasaran

Sasaran 1 : Meningkatnya Fasilitas Pembangunan dan Pengembangan Bina Spiritual Masyarakat

Indikator 1 : Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang aktif

Indikator 2 : Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji

Indikator 3 : Peringkat dalam event Keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini terdiri dari 3 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	3	4	5	6
1	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang aktif	7 Lembaga (LPTQ, MUI, BAZNAS, MES, MCI, BKPRMI, DMI)	9 Lembaga (LPTQ, MUI, BAZNAS, MES, MCI, BKPRMI, DMI, JPRMI, Pemuda Masjid Raya)	128,58%
2	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji	sangat puas	sangat puas	100%
3	Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK)	peringkat 10 Nasional	Peringkat 5 Nasional	200%

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 142,86% dengan kategori Sangat Baik berdasarkan tabel 3.1. Pencapaian Indeks Jumlah Lembaga Spiritual yang aktif tercapai, yaitu dari target 7 Lembaga dengan realisasi 9 Lembaga yang aktif di tahun 2022, Pencapaian indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji tercapai, yaitu dari target sangat puas dengan realisasi sangat puas, dan pencapaian indeks Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK) tercapai, yaitu dari target Peringkat 10 Nasional dengan realisasi Peringkat 5 Nasional dan capaian ini dikategorikan kedalam capaian

yang sangat baik sesuai dengan Permenpan 14 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

NO	INTERVAL NILAI	KINERJA PELAYANAN
1.	25,00 - 64,99	Tidak Baik
2.	65,00 - 76,60	Kurang Baik
3.	76,61 - 88,30	Baik
4.	88,31 - 100	Sangat Baik

STQ dan MTQ merupakan satu kesatuan kegiatan musabaqah, meskipun berbeda dari segi waktu maupun tujuan pelaksanaan. STQ digelar dua tahun sekali pada tahun-tahun ganjil, sedangkan Msabaqah Tilawatil Quran (MTQ) digelar dua tahun sekali pada tahun-tahun genap. STQ dilaksanakan untuk memilih juara-juara yang akan bertanding pada ajang MTQ, yang nantinya akan mewakili Indonesia pada MTQ Internasional.

Pada MTQ Nasional Tahun 2022 Jawa Timur tampil sebagai Juara, ranking 2 DKI Jakarta, Ranking 3 Kalimantan Selatan, Ranking 4 Jawa Barat, dan Ranking 5 Ranking Sumatera Barat.

Kafilah Sumatera Barat untuk MTQ Nasional 2022 terdiri atas 54 Orang yang berlaga pada 8 Cabang dan 22 Golongan. Cabang Pertama Tilawah terdiri dari dan Anak-anak., remaja, dewasa, tunanetra dan tartil. Cabang Tahfidz ada 7 Golongan Tahfidz Satu Juz tilawah, Satu Juz Non Tilawah, 5 Juz Tilawah, 5 Juz Non Tilawah, 10 Juz, 20 Juz dan 30 Juz, masing-masing putra putri. Cabang Khot ada 4 Golongan terdiri dari naskah, hiasan, kontenporer dan kitab standar. Cabang Fahmil Qur'an, Cabang Sarhil Qur'an, Cabang Tafsir ada 3 Golongan terdiri dari Bahasa Arab , Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Cabang Qira'at ada 3 Golongan terdiri dari Muratal remaja, mujawat dewasa dan Muratal dewasa dan Cabang Karya Tulis Ilmiah.

Biro Kesejahteraan Rakyat berdasarkan dari penilaian IKM yang telah dilakukan termasuk kedalam kategori Baik dengan niali IKM 142,86%. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi

a. Sumber Data

Data bersumber dari Sub Bagian Kelembagaan Bina Mental Spiritual, Jumlah lembaga Spiritual yang aktif di bawah pengawasan Biro Kesejahteraan Rakyat, Indeks Kepuasan terhadap layanan embarkasi haji pada tahun 2022 dan data data Peringkat Sumatera Barat dalam event keagamaan MTQ Nasional Tahun 2022.

b. Metodologi Perhitungan

Jumlah Lembaga Spiritual yang aktif bisa dilihat dari data yang diberikan oleh Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual. Sedangkan untuk penentuan Indeks Kepuasan Layanan embarkasi Haji, Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual menyebarkan kuisioner kepada jama'ah Haji pada Tahun 2022. Untuk Peringkat Sumatera Barat dalam event keagamaan MTQ Nasional Tahun 2022 bisa dilihat dari Media Nasional, hasil yang didapatkan Sumatera Barat dalam event keagamaan MTQ Nasional Tahun 2022 adalah peringkat 5 Nasional.

2. Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Bina Spritual yang aktif dan Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji tidak bisa dibandingkan capaian kinerjanya, dikarenakan ada pergantian nomenkatur Biro Bina Menmtal dan Kesra kepada Biro Kesra pada Bulan Mei Tahun 2021.

Indikator Kinerja yang akan dilihat Pada Bagian ini yaitu Indeks Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK), dimana target yang diberikan untuk tahun 2022 pada Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu Peringkat 10 sedangkan realisasi untuk tahun 2022 masih peringkat 10 dengan capaian indikator 200% (memuaskan).

Tabel 3.4 :

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2021			KINERJA 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan fasilitas pembangunan dan pengembangan bina spiritual masyarakat	Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK)	Peringkat 10	Peringkat 10	100%	Peringkat 10	Peringkat 5	200 %

Pada tabel diatas terlihat bahwa untuk tahun 2021 dengan Sasaran Strategis Meningkatkan fasilitas pembangunan dan pengembangan bina spiritual masyarakat dan Indikator Kinerja yaitu Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK) dengan target nilai IKM Peringkat 10 dan realisasi untuk tahun 2021 dengan nilai IKM Peringkat 10 dengan capaian sebesar 100 persen. Sedangkan untuk tahun 2022 dengan sasaran strategis dan indikator yang sama memiliki target nilai Peringkat 10 dengan realisasi nilai Peringkat 5 dan capaiannya sebesar 200 persen. Target dari Indikator Kinerja ini ditetapkan bersama melalui rapat dengan OPD teknis terkait yang kemudian ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat yang menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan setiap tahunnya.

b. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra

Target untuk indikator Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK) pada tahun 2022 (tahun kedua) di dalam dokumen Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat 2021 – 2026 adalah Peringkat 10, terealisasi dengan nilai diatasnya, yaitu nilai Peringkat 5. Maka target tahun kedua pada Renstra 2021 – 2026 untuk indikator terpenuhi atau tercapai target. Sedangkan untuk masa periode Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu untuk periode lima tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 mempunyai target yaitu: dengan nilai Peringkat 10 sampai dengan Peringkat 8. Pencapaian yang telah dicapai oleh Biro Kesejahteraan Rakyat untuk tahun kedua renstra ini yaitu peringkat 5, sehingga untuk lima tahun kedepan bisa ditargetkan melebihi dari peringkat 8.

Target untuk indikator Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang aktif pada tahun 2022 (tahun kedua) di dalam dokumen Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat 2021 –

2026 adalah 7 Lembaga. Maka target tahun kedua pada Renstra 2021 – 2026 untuk indikator terpenuhi atau tercapai target. Sedangkan untuk masa periode Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu untuk periode lima tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 mempunyai target yaitu: dengan 7 Lembaga Spiritual yang aktif sampai dengan 8 Lembaga Spiritual yang aktif. Pencapaian yang telah dicapai oleh Biro Kesejahteraan Rakyat untuk tahun kedua renstra ini yaitu peringkat 9 Lembaga Spiritual yang aktif, sehingga untuk lima tahun kedepan bisa ditargetkan melebihi dari 8 Lembaga Spiritual yang aktif.

Target untuk indikator Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji pada tahun 2022 (tahun kedua) di dalam dokumen Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat 2021 – 2026 adalah sangat puas. Maka target tahun kedua pada Renstra 2021 – 2026 untuk indikator terpenuhi atau tercapai target. Sedangkan untuk masa periode Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu untuk periode lima tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 mempunyai target yaitu sangat puas.

c. Realisasi kinerja Tahun 2022 dengan standar nasional

Mengingat tidak adanya target nasional untuk pencapaian sasaran strategis ini, maka perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 terhadap target nasional tidak dapat digambarkan.


d. Analisis penyebab keberhasilan kinerja yang telah dilakukan

Adapun faktor pendorong dari keberhasilan pencapaian ini adalah karena:

1. Adanya dukungan penuh dari seluruh ASN Biro Kesejahteraan Rakyat untuk menyelesaikan Kegiatan.
2. Adanya kerjasama Biro Kesra dengan Stakeholder terkait yang menyebabkan berjalan lancarnya kegiatan.
3. Sarana dan prasarana yang mendukung untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini sebanyak 1 program yaitu Program Kesejahteraan Rakyat dengan 1 kegiatan yaitu Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual pada Sub kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual.

 **Sasaran 2** : Optimalisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar

Indikator 2 : Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	3	4	5	6
1	Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	6	6	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik berdasarkan tabel 3.1. Pencapaian Indeks Jumlah Lembaga Spiritual yang aktif tercapai, yaitu dari target 6 Rumusan Kebijakan dengan realisasi 6 Rumusan di tahun 2022.

Sasaran 3 : Optimalisasi Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar

Indikator 3 : Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang diimplementasikan


Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	3	4	5	6
I	Optimalisasi Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	6	6	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik berdasarkan tabel 3.1. Pencapaian Indeks Jumlah Lembaga Spiritual yang aktif tercapai, yaitu dari target 6 Optimalisasi Implementasi Kebijakan dengan realisasi 6 Optimalisasi Implementasi Kebijakan di tahun 2022.

 **Sasaran 4** : Meningkatnya Tindaklanjut Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Indikator 4 : Jumlah Hasil evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	3	4	5	6
I	Meningkatnya Tindak lanjut Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6	6	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik berdasarkan tabel 3.1. Pencapaian Indeks Meningkatnya Tindak lanjut Hasil Evaluasi

Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, yaitu dari target 6 Meningkatnya Tindak lanjut Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan realisasi 6 Meningkatnya Tindak lanjut Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat di tahun 2022.

✚ **Sasaran 5** : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Indikator 5 : Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	3	4	5	6
I	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B (62)	61.33	98.91%

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 98.91% dengan kategori Sangat Baik berdasarkan tabel 3.1. Pencapaian Indeks Nilai Akuntabilitas Kinerja, yaitu dari target 62 Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan realisasi 61.33 Nilai Akuntabilitas Kinerja di tahun 2022.

✚ **Sasaran 6** : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi

Indikator 6 : Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.8

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	3	4	5	6
I	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	Baik (77)	83.40	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 100% dengan kategori Sangat Baik berdasarkan tabel 3.1. Pencapaian Indeks Meningkatnya Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi, yaitu dari target 6 Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi dengan realisasi 6 Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi di tahun 2022.

D. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dan pemenuhan capaian Sasaran Strategis tahun 2022 Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tersedia anggaran sebesar Rp. Rp. 34.020.072.223,-. Hingga 31 Desember 2022, anggaran tersebut telah direalisasikan dengan persentase sebesar 91,58% atau sebesar Rp. 20.985.787.109,- dimana dilihat dari persentase pencapaiannya sudah tergolong pada tingkat sangat baik (>84%). Hal ini tidak terlepas dari perencanaan serta konsistensi aparatur Biro Administrasi Pimpinan dalam penyelenggaraan anggaran kegiatan.



Dalam
Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	34.020.072.223,00	31.155.886.877,20	91,58	-
5.1.	BELANJA OPERASI	33.962.681.023,00	31.098.641.877,20	91,57	-
5.1.01.	Belanja Pegawai	101.550.000,00	91.950.000,00	90,55	-
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	101.550.000,00	91.950.000,00	90,55	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	101.550.000,00	91.950.000,00	90,55	-
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	83.790.000,00	83.790.000,00	100,00	-
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	17.760.000,00	8.160.000,00	45,95	-
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.531.101.510,00	8.541.191.877,20	89,61	-
5.1.02.01.	Belanja Barang	1.097.645.925,00	869.148.748,00	79,18	-
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	1.097.645.925,00	869.148.748,00	79,18	-
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	216.574.000,00	181.399.998,00	83,76	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.598.600,00	37.965.800,00	93,52	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	48.193.000,00	39.474.400,00	81,91	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	156.294.625,00	125.702.250,00	80,43	-
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	13.300.000,00	7.100.000,00	53,38	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	73.471.700,00	59.447.400,00	80,91	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.528.500,00	1.528.500,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	65.821.500,00	65.253.400,00	99,14	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.439.000,00	55.794.000,00	78,10	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	253.300.000,00	140.908.000,00	55,63	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	127.500.000,00	124.950.000,00	98,00	-
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	29.625.000,00	29.625.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	5.032.698.160,00	4.644.834.142,20	92,29	-
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	3.900.148.160,00	3.786.085.102,20	97,08	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan	429.650.000,00	383.760.000,00	89,32	-

	Panitia				
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	105.200.000,00	105.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	42.900.000,00	25.850.000,00	60,26	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	599.502.985,00	596.855.016,00	99,56	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	600.385.175,00	584.341.514,00	97,33	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.697.500.000,00	1.680.440.000,00	98,99	-
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	384.000.000,00	381.773.572,20	99,42	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	15.000.000,00	6.000.000,00	40,00	-
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	26.010.000,00	21.865.000,00	84,06	-
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.000.000,00	7.989.950,00	99,87	-
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	8.000.000,00	7.989.950,00	99,87	-
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	48.000.000,00	23.800.000,00	49,58	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	48.000.000,00	23.800.000,00	49,58	-
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	27.900.000,00	27.900.000,00	100,00	-
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	27.900.000,00	27.900.000,00	100,00	-
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.048.650.000,00	799.059.090,00	76,20	-
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.048.650.000,00	799.059.090,00	76,20	-
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	81.183.400,00	61.154.900,00	75,33	-
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	81.183.400,00	61.154.900,00	75,33	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	34.503.400,00	21.598.000,00	62,60	-
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	34.100.000,00	33.614.400,00	98,58	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.830.000,00	1.317.500,00	71,99	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.750.000,00	4.625.000,00	43,02	-
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	3.069.574.025,00	2.816.054.087,00	91,74	-
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.069.574.025,00	2.816.054.087,00	91,74	-

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.069.574.025,00	2.816.054.087,00	91,74	-
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	250.000.000,00	150.000.000,00	60,00	-
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	250.000.000,00	150.000.000,00	60,00	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	250.000.000,00	150.000.000,00	60,00	-
5.1.05.	Belanja Hibah	24.330.029.513,00	22.465.500.000,00	92,34	-
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	24.330.029.513,00	22.465.500.000,00	92,34	-
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	24.330.029.513,00	22.465.500.000,00	92,34	-
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	24.330.029.513,00	22.465.500.000,00	92,34	-
5.2.	BELANJA MODAL	57.391.200,00	57.245.000,00	99,75	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.391.200,00	57.245.000,00	99,75	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	57.391.200,00	57.245.000,00	99,75	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	49.500.000,00	49.475.000,00	99,95	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	49.500.000,00	49.475.000,00	99,95	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.891.200,00	7.770.000,00	98,46	-
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.891.200,00	7.770.000,00	98,46	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(34.020.072.223,00)	(31.155.886.877,20)	91,58	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(34.020.072.223,00)	(31.155.886.877,20)	91,58	-

Laporan Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 telah menyajikan sejumlah keberhasilan capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat pada tahun anggaran 2022 dan perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian indikator utama (IKU) berdasarkan tujuan dan sasaran. Capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Dengan demikian LAKIP Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Biro Kesra secara keseluruhan.

Berdasarkan analisa pencapaian kinerja pada tahun 2022, secara keseluruhan pencapaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat pada Tahun 2022 berhasil dicapai dengan persentase capaian sebesar 99,81% yang dapat dikategorikan dengan sangat baik dan juga didukung dengan realisasi anggaran sebesar 91,58% dari total anggaran yang dikelola oleh Biro Kesejahteraan Rakyat sebanyak Rp. 34.020.072.223,-.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh pihak terkait dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan pengelolaan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat yang pada akhirnya dapat mewujudkan Visi dan Misi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Disadari bahwa laporan ini belum sempurna sebagaimana diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sudah mendapatkan sedikit gambaran kinerja yang dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2022. Dengan berbagai permasalahan yang masih ada, Biro Kesejahteraan Rakyat akan terus melakukan berbagai upaya perbaikan di setiap level dan bagian organisasi untuk menghadapi tantangan yang semakin berat di depan.